

ANALISIS HUKUM PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 13/KPPU-L/2015

Muhammad Rifqi Fajrin

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk persyaratan memperoleh gelar magister hukum dengan judul Analisis Hukum Persekongkolan Dalam Tender Pada Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-L/2015. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai analisis hukum yang terjadi akibat perbuatan persekongkolan tender yang dilakukan oleh Para Pelaku dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-L/2015.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan jenis pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dengan cara pengolahan data yang preskriptif.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa analisis hukum yang terjadi dari adanya persekongkolan tender adalah dapat menciptakan hambatan bagi peserta tender lainnya yang justru lebih berpotensi untuk menang dan dapat menimbulkan kerugian pada Negara.

Kata Kunci: Persekongkolan Tender, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Persekongkolan Horizontal, Persekongkolan Vertikal

**LEGAL ANALYSIS OF CONSPIRACY IN TENDERS IN KPPU DECISION
NUMBER 13/KPPU-L/2015**

Muhammad Rifqi Fajrin

Abstract

This research was conducted for the requirements of obtaining a master's degree in law with the title Legal Analysis of Conspiracy in Tender in KPPU Decision Number 13 / KPPU-L / 2015. The problem discussed in this study is regarding the legal analysis that occurs as a result of the tender conspiracy committed by the Actors in KPPU Decision Number 13 / KPPU-L / 2015.

The research method used is normatif approach with type of case approach and legislation approach. Normatif research is carried out by researching library materia or secondary data as basic material to be researched using qualitative analysis by preskriptif data processing.

From the results of this study, it can be concluded that the legal analysis that occurs from the existence of tender conspiracy is able to create obstacles for other bidders who actually have more potential to win and can cause harm to the State

Key Words: *Bid Rigging, Law Number 5 Year1999, Horizontal Bid Rigging, Vertikal Bid Rigging*